BAB V

KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka simpulan untuk penelitian ini adalah :

1. Variabel ukuran pemerintah daerah yang diproksikan dalam total aset tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan LPKD di Bakorwil I Madiun pada tahun anggaran 2016-2019. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan nilai t hitung $-0,878$ lebih kecil dari t tabel $1,696$ dan tingkat signifikan $0,387$ lebih besar dari $0,05$.
2. Variabel kemandirian daerah yang diproksikan dengan total pendapatan daerah dibandingkan dengan total pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan LKPD di Bakorwil I Madiun pada tahun anggaran 2016-2019. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan nilai t hitung $1,664$ lebih kecil dari t tabel $1,696$ dan tingkat signifikan $0,106$ lebih besar $0,05$.
3. Variabel *intergovernmental revenue* yang diproksikan dengan dana transfer dibandingkan total pendapatan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan LKPD di Bakorwil I Madiun pada tahun anggaran 2016-2019. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan nilai t hitung $0,025$ lebih kecil dari t tabel $1,696$ dan tingkat signifikan $0,980$ lebih besar dari $0,05$.
4. Variabel SKPD/OPD yang diproksikan dengan jumlah SKPD/OPD tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan LKPD di Bakorwil I Madiun pada tahun anggaran 2016-2019. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang menunjukkan nilai t hitung $-0,660$ lebih kecil dari t tabel $1,696$ dan tingkat signifikan $0,514$ lebih besar dari $0,05$.
5. Variabel temuan audit yang diproksikan dengan jumlah temuan memberikan pengaruh pada pengungkapan LKPD di Bakorwil I Madiun pada tahun anggaran 2016-2019. Hasil penelitian ini terbukti dari nilai t hitung $2,682$ yang lebih besar dari t tabel $1,696$ serta tingkat signifikan $0,012$ yang lebih kecil dari $0,05$.
6. Variabel tingkat penyimpangan yang diproksikan dengan nominal penyimpangan dalam rupiah dibandingkan total belanja tidak memberikan pengaruh pada pengungkapan LKPD di Bakorwil I Madiun pada tahun anggaran 2016-2019. Hasil penelitian ini terbukti dari nilai t hitung $0,445$ yang lebih kecil dari t tabel $1,696$ serta tingkat signifikan $0,659$ yang lebih besar $0,05$.

5.2 Keterbatasan

1. Variabel yang digunakan hanya menjelaskan beberapa karakteristik pemerintah daerah dalam pengungkapan laporan keuangan.
2. Dalam proses pengujian terdapat gejala pada uji multikolinieritas yang menyebabkan terhapusnya satu variabel independen dari penelitian.

5.3 Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan bisa menambahkan variabel lain yang diduga dapat menggambarkan karakteristik pemerintah daerah pada pengungkapan laporan keuangan seperti opini audit, spesialisasi pekerjaan dan sebagainya.
2. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan untuk mempertimbangkan kembali dalam memilih variabel independen untuk mengantisipasi gejala pada uji multikolinieritas maupun pengujian lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Amaliah, E. F., & Haryanto. 2019. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015-2017. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2), 1-13.
- Aziz, A. 2016. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Jawa Timur). *Jurnal Riset Ekonomi dan Bisnis*, 11(1), 87-101.
- Cahyat, A. 2004. Sistem Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten. *Center for International Forestry Research*.
- Ghozali, Imam. 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
- Ghozali, Imam. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23. Edisi 8*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2017. *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayani, S. 2010. Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Indonesia Tahun 2006. *Jurnal Ilmu Administrasi : Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi*, 7(2), 143-154.
- Hanik, F. U., & Karyanti, T. D. 2014, Juli. Analisis Rasio Keuangan Daerah Sebagai Penilaian Kerja. *JABPI*, 22(2), 143-156.
- Hilmi, A. Z., & Martani, D. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1-26.
- Kurniawan, C. H., & Simbolon, H. U. 2018. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Di Seluruh Provinsi Indonesia. *Modus*, 30(1), 54-70.
- Mantau, O. P. 2020. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada LKPD Kabupaten/Kota di Jawa Timur). (Skripsi Tidak Dipublikasikan). Madiun : Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya Kampus Madiun.
- Maulana, C., & Handayani, B. D. 2015. Pengaruh Karakteristik, Kompleksitas Pemerintahan dan Temuan Audit Terhadap Tingkat Pengungkapan LKPD. *Accounting Analysis Journal*, 4(4), 1-11.
- Mujilan, A. 2018. *Metodologi Penelitian Edisi 3*. Riset Ilmu Sosial dan Publikasi.
- Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2010 tentang *Standar Akuntansi Pemerintahan*.

- Priharjanto, A., & Wardani, Y. Y. 2017. Pengaruh Temuan, Tingkat Penyimpangan, Opini Audit Dan Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia. *Info Artha*, 97-110.
- Puspitasari, T. 2013. Pengaruh Tingkat Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Kompleksitas Pemerintah Daerah (Jumlah SKPD) Terhadap Kelemahan Pengendalian Intern Pada Pemerintah Daerah. Jakarta.
- Setyaningrum, D., & Syafitri, F. 2012. Analisis Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 9(2), 154-170.
- Suhardjanto, D., & Yulianingtyas, R. R. 2011, November. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah Terhadap Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Auditing*, 8(1), 30-42.
- Suparno, & Nanda, R. 2016. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah, Diferensiasi Fungsional, Dan Spesialisasi Fungsional Terhadap Tingkat Pengungkapan Wajib Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Dinamika Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 105-118.
- Supriyanto, H. 2021. *Pertama Serahkan LKPD , Wali Kota Madiun dapat Apresiasi dari BPK Jatim*. Kota Madiun: Bhirawa Online.
- Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*.
- Utami, S. R., & Sulardi. 2019. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Opini Audit, dan Rasio Kemandirian Terhadap Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 19(2), 253-263.
- Verawaty, Jaya, A. K., & Alsri, A. P. 2019. Kepatuhan Pengungkapan Wajib Dalam LKPD Provinsi Di Indonesia. *Seminar Hasil Penelitian Vokasi*, 1, 46-53.
- Waliyyani, G. M., & Mahmud, A. 2015. Pengaruh Karakteristik Pemerintah Terhadap Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. *Accounting Analysis Journal*, 4(2), 1-8.